



Meruntuhkan Tirani, Membangun Pembebasan: Kajian Poskolonial terhadap Matius 2:13-23 dan Relevansinya dalam Realitas Pengungsian Kontemporer

Audriano Kalundang

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email Correspondence: audrianokalundang@gmail.com

Abstract: *This article discusses the narrative of Jesus' flight to Egypt in Matthew 2:13–23 by placing it within a postcolonial hermeneutical framework and the reality of contemporary displacement. The exile of Joseph, Mary, and the infant Jesus is not merely seen as a theological symbol that fulfils prophecy, but rather seeks to reveal the power relations, agency, and resistance of the subaltern under imperial rule. This study aims to emphasise that the flight in Matthew 2:13–23 represents the strategies of marginalised subjects in facing paranoid and repressive power, and to relate it to the reality of contemporary displacement. This study uses a qualitative method with a postcolonial hermeneutic approach to interpret Matthew 2:13–23. Data were collected through a literature study and text analysis. The results show that the family of Joseph, Mary, and the infant Jesus appear as migrant subjects who have the capacity to read the political situation, make strategic decisions, and develop survival patterns as a form of non-confrontational resistance. These findings challenge the church to revise its pastoral and diaconal paradigm towards refugees and/or subalterns, from objects of pity to theological subjects who bring experiences of faith, hope, and practices of liberation.*

Key words: *Power Relations, Postcolonialism, Exile, Liberation, Matthew 2:13-23*

Abstrak: Tulisan ini membahas narasi penyingkiran Yesus ke Mesir dalam Matius 2:13–23 dengan menempatkannya dalam kerangka hermeneutik poskolonial dan realitas pengungsian kontemporer. Pengungsian Yusuf, Maria dan Yesus kecil tidak sekadar dilihat sebagai simbol teologis semata yang menggenapi nubuatan namun berusaha menyingkap relasi kuasa, agensi, serta resistensi *subaltern* di bawah kekuasaan imperial. Tulisan ini bertujuan menegaskan bahwa pengungsian dalam Matius 2:13–23 merepresentasikan cara dan strategis subjek marginal dalam menghadapi kekuasaan yang paranoid dan represif, serta merelevansikannya dengan realitas pengungsian kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik poskolonial untuk menafsirkan Matius 2:13–23. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga Yusuf, Maria dan Yesus kecil tampil sebagai subjek migran yang memiliki kapasitas membaca situasi politik, mengambil keputusan strategis, dan membangun pola bertahan hidup sebagai bentuk resistensi non-konfrontatif. Temuan ini menantang gereja untuk merevisi paradigma pastoral dan diakonianya terhadap pengungsi dan/atau *subaltern*, dari objek belas kasihan semata menjadi subjek teologis yang membawa pengalaman iman, harapan, dan praksis pembebasan.

Kata kunci: Relasi Kuasa, Poskolonial, Pengungsian, Pembebasan, Matius 2:13-23

Article History:

Submitted: 18 Januari 2026 | Revised: 31 Januari 2026 | Accepted: 31 Januari 2026

Copyright:

© 2026. The Authors. Licensee: Salvation.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kekuasaan tidak hanya berbicara terkait kapasitas untuk membuat keputusan atau memerintah kelompok sosial, tetapi selalu merupakan struktur yang melekat pada moral dan hukum melalui kewenangan yang terlegitimasi secara normatif.¹ Realitas menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum atau kontrol publik berpotensi berubah menjadi kekuasaan sewenang-wenang (*arbitrary power*), yaitu bentuk dominasi yang mengekspresikan karakter tiranik dari penguasa yang bertindak berdasarkan *imperatif* internal mereka sendiri tanpa akuntabilitas eksternal.² Dalam konteks ini, tirani menjadi fenomena yang merusak struktur sosial karena ia menafikan legitimasi prosedural dan menghancurkan *check and balance* yang menjadi fondasi pemerintahan yang sah. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana tirani tidak hanya hadir sebagai bentuk pemerintahan absolut yang telah selesai, tetapi juga muncul melalui praktik otoriter kontemporer yang memanfaatkan teknologi informasi dan narasi ideologis untuk mempertahankan dominasi dan melumpuhkan oposisi.

Realitas kekuasaan tiranik berkonsekuensi langsung terhadap kehidupan jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keselamatan dan hak dasar hidup yang layak. Banyak orang kehilangan rumah karena konflik, kekerasan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang memaksa komunitas untuk bergerak melintasi batas negara demi mencari perlindungan termasuk pengungsi, pencari suaka, dan pengungsi internal yang terpisah dari komunitas mereka oleh penggunaan kekuasaan (politik) yang rusak dan konflik bersenjata yang terus berkepanjangan.³ Pada saat yang sama, dominasi kekuasaan di era modern tidak selalu tampil dalam bentuk otoritarianisme klasik, tetapi sering beroperasi sebagai otoritarianisme terfragmentasi melalui kontrol wacana, manipulasi informasi, dan pergeseran legitimasi kolektif yang mengaburkan batas antara negara demokratis dan struktur tiranik yang mendominasi publik.⁴ Pola kekuasaan semacam ini menegaskan bahwa pengungsian merupakan konsekuensi struktural dari relasi kuasa yang menindas, yang tidak hanya memproduksi ketakutan, tetapi juga ketidakamanan, perampasan hak hidup, dan penghancuran tatanan sosial komunitas.

Sejalan dengan kerangka relasi kuasa yang menindas, narasi Injil Matius juga menjelaskan kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus secara eksplisit di bawah bayang-bayang kekuasaan politik yang represif. Matius menggambarkan Herodes sebagai figur penguasa yang menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang melalui kekerasan negara dan teror politik untuk mempertahankan stabilitas tahtanya. Ancaman pembunuhan terhadap bayi-bayi di Betlehem memaksa Yusuf membawa Maria dan Yesus kecil menyingkir ke Mesir, sebuah tindakan yang menandai pengalaman pengungsian sebagai respons langsung terhadap tirani. Sampai dititik ini, penulis berpendapat bahwa narasi ini tidak menampilkan pengungsian sebagai pilihan spiritual semata, tetapi sebagai strategi bertahan hidup di tengah struktur

¹ Gerald J. Postema, *Law's Rule: The Nature, Value, and Viability of the Rule of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2023), 23-24.

² Farrah Ahmed, "Arbitrary Power: Caricature and Concept," *Law and Philosophy* 43, no. 6 (2024): 641–68, <https://doi.org/10.1007/s10982-024-09509-0>.

³ James C. Simeon, "The Use and Abuse of Forced Migration and Displacement As a Weapon of War," *Front. Hum. Dyn* 5, no. 172954 (2023), <https://doi.org/10.3389/fhumd.2023.1172954>.

⁴ Hasan Oguz, "Authoritarian Recursions: How Fiction, History, and AI Reinforce Control in Education, Warfare, and Discourse," *Arxiv Preprint*, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.09030>.

kekuasaan yang menghancurkan rasa aman, ruang hidup, dan hak dasar. Dengan demikian, narasi Yesus menyingkir ke Mesir, secara tegas membingkai identitas Yesus dalam pengalaman pengungsian yang dihasilkan oleh kekerasan politik negara, sebagai subjek yang hidup di bawah struktur kekuasaan imperial Romawi yang mempertahankan stabilitas politik melalui kekerasan, pengawasan, dan eliminasi ancaman.

Dalam diskursus akademik poskolonial tentang Matius 2:13–23, kajian yang secara langsung menempatkan pengungsian sebagai dampak relasi kuasa yang menindas masih terbatas. Hauw Suk Siang membaca teks ini melalui genre apokaliptik dengan fokus pada mimpi Yusuf dan peran malaikat,⁵ sehingga dimensi politik kekuasaan dan pengalaman pengungsian tidak menjadi perhatian utama. Roswita Maria Boe dan rekan-rekan menekankan peran keibuan Maria sebagai teladan iman dan kebajikan, dengan penekanan spiritual dan etis tanpa analisis atas struktur kekuasaan yang memicu pengungsian.⁶ Muller mengkaji Matius 2:16–18 secara sosiologis-retoris untuk menunjukkan peran ideologi kekaisaran Romawi dalam pembantaian bayi,⁷ tetapi tidak mengembangkan pengungsian sebagai konsekuensi struktural tirani. Sementara itu, Linda Stargel menafsirkan pelarian Yesus ke Mesir sebagai motif eksodus reflektif,⁸ namun tetap bergerak dalam kerangka tipologi teologis dan belum merumuskan kritik poskolonial atas relasi kuasa yang memaksa perpindahan paksa. Bertolak dari celah tersebut, penelitian ini menempatkan Matius 2:13–23 dalam kerangka hermeneutik poskolonial dengan fokus pada pengungsian sebagai produk langsung tirani imperium. Penelitian ini membaca kekuasaan Herodes sebagai bentuk dominasi kolonial yang memproduksi ketakutan, teror, keterpaksaan, dan penghilangan ruang hidup.

Argumentasi utama yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif poskolonial, narasi Matius 2:13–23 dipandang sebagai narasi perlawanan sekaligus pembebasan terhadap tirani melalui strategi bertahan hidup *subaltern*, dengan menempatkan pengalaman pengungsian sebagai praksis pembebasan yang menolak tunduk pada kekerasan negara tanpa harus menghadirkan konfrontasi langsung. Agensi dan resistensi *subaltern* tidak selalu tampil dalam bentuk perlawanan terbuka atau revolusi bersenjata, namun justru bekerja melalui mobilitas, penghindaran, dan pemanfaatan celah-celah kekuasaan. Kajian ini menjadi penting mengingat meningkatnya realitas pengungsian kontemporer yang lahir dari kekuasaan politik yang represif, sekaligus minimnya pembacaan Biblis yang secara kritis mengaitkan teks Injil dengan relasi kuasa, tirani, dan pengalaman hidup subjek yang dipaksa bergerak demi mempertahankan keberlangsungan hidup.

Pembahasan dalam tulisan ini akan memaparkan lima fokus analisis utama sebagai landasan dan penjelasan untuk menegaskan dan memperjelas argumentasi utama yang

⁵ Hauw Suk Siang, “Peran Malaikat dalam Mimpi Yusuf Berdasarkan Matius 2:13-23: Pendekatan Genre Apokaliptik,” *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.37196/kenosis.v9i1.670>.

⁶ Roswita Maria Boe, Siprianus S. Senda, and Mikhael Valens Boy, “Peran Keibuan Maria dalam Matius 2:13-23 dan Relevansinya bagi Kaum Kristiani Masa Kini,” *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPak)* 24, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.34150/jpak.v24i2.721>.

⁷ Whitney Caroline Muller, “‘Issi My Kindt Nie’: An Ideological Study of Matthew 2:16–18 Socio-Cultural Perspectives of Children as Sanctioning of Violence against Them” (Master’s Thesis: Stellenbosch University, 2023).

⁸ Linda Stargel, “Exodus in Matthew’s Looking Glass: Jesus’s Flight to Egypt (Matt 2:13–18) as a Reflection Story,” *Horizons in Biblical Theology* 43, no. 2 (2021): 166–86, <https://doi.org/10.1163/18712207-12341431>.

dibangun. Pada bagian pertama, menjelaskan terkait pembacaan Alkitab dengan perspektif poskolonial sebagai praktik pembacaan yang membebaskan. Bagian kedua, menguraikan dengan cermat terkait logika tirani imperium Romawi dan bagaimana dominasi kekuasaan Herodes. Bagian ketiga, menunjukkan penjelasan bahwa fakta realitas pengungsian sebagai konsekuensi langsung dari relasi kuasa kolonial. Selanjutnya, menganalisis serta mengkaji agensi dan resistensi *subaltern* dalam kaitannya dengan kekuasaan dan dominasi yang semena-mena dalam Matius 2:13-23. Terakhir, bagian kelima memberi relevansi dan implikasi teologis dalam kaitannya dengan realitas pengungsian kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik poskolonial untuk menafsirkan Matius 2:13–23. Penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka dan analisis teks. Studi pustaka digunakan untuk menelaah Alkitab sebagai teks utama, khususnya Matius 2:13–23. Hal ini memungkinkan penulis dalam mengidentifikasi, memilah, dan menganalisis literatur yang sesuai dengan fokus penelitian untuk menggali dan mengungkapkan makna dari teks,⁹ kemudian menggunakannya sebagai kerangka interpretatif dalam membaca teks Alkitab. Analisis dengan menggunakan hermeneutik poskolonial dipilih karena memungkinkan pembacaan kritis terhadap teks Alkitab dengan menempatkannya dalam relasi kuasa kolonial, praktik tirani, dan pengalaman subjek yang dimarginalkan. Hermeneutik poskolonial sebagai pendekatan yang membongkar fungsi imperialis Alkitab, mengkritik tafsir Barat, dan mendorong pembacaan yang berpihak pada komunitas terjajah dan konteks *Global South*.¹⁰ Dengan demikian, upaya membaca Alkitab dengan metode hermeneutik poskolonial menjadi ruang produksi makna yang berinteraksi dengan ideologi imperium serta praktik resistensi yang muncul dari dalam struktur penindasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membaca Alkitab dengan Perspektif Poskolonial: Suatu Praktik Pembacaan yang Membebaskan

Dalam kajian Alkitab, kritik poskolonial muncul kuat pada akhir 1980-an hingga 1990-an. Pendekatan ini lahir setelah kritik marxis, feminis, dan tafsir Dunia Ketiga (*Global South*) memengaruhi arah studi Biblikal. Para penafsir mulai mempertanyakan posisi kuasa dalam teks dan praktik penafsiran. Sugirtharajah menjelaskan bahwa kritik Alkitab poskolonial berkembang sebagai respons terhadap dominasi tafsir Barat yang berakar pada rasionalisme dan pietisme Eropa abad ke-19.¹¹ Dominasi ini sering mengabaikan pengalaman kolonial, suara *subaltern*, dan konteks sosial pembaca non-Barat. Pendekatan poskolonial kemudian membuka ruang bagi pembacaan Alkitab yang kritis terhadap kuasa, berpihak pada yang terpinggirkan,

⁹ Sonny Eli Zaluchu, “Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan,” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 249–66, <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93>.

¹⁰ Werner Kahl, “Postcolonial Biblical Hermeneutics and Exegesis,” *Ghana Journal of Religion and Theology* 14, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.4314/gjrt.v14i1.3>.

¹¹ R. S. Sugirtharajah, *Exploring Postcolonial Biblical Criticism: History, Method, Practice* (Chichester and Malden: Wiley-Blackwell, 2012), 1-2.

dan relevan dengan realitas penindasan historis maupun kontemporer.¹² Dengan demikian, hermeneutik poskolonial menjadi alat untuk membongkar hegemoni epistemik yang sering mewarnai pembacaan tradisional, terutama tafsir yang berakar pada narasi dan asumsi Barat yang mengabaikan pengalaman sosio-politik yang berbeda.

Membaca Alkitab dengan pendekatan poskolonial merupakan praktik teologis yang secara sadar diarahkan untuk mengkritik kolonialisme, neokolonialisme, diktatorisme, dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang beroperasi melalui struktur kekuasaan.¹³ Pendekatan ini bertolak dari kesadaran bahwa Alkitab tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan terbentuk, disebarkan, dan ditafsirkan di tengah sejarah ekspansi imperium, dominasi politik, serta penaklukan budaya.¹⁴ Hal ini menegaskan bahwa kritik Alkitab poskolonial berfokus pada dampak kolonialisme dan kekuasaan imperial dengan mengungkap relasi dominasi dalam teks dan penafsiran Alkitab serta mengajukan pembacaan alternatif yang kritis terhadap representasi sejarah dan identitas.¹⁵ Dalam kerangka ini, hermeneutik poskolonial tidak hanya mengkaji apa yang dikatakan teks, tetapi juga menelusuri bagaimana teks digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, menormalisasi kekerasan, dan membungkam suara *subaltern*. Oleh karena itu, pembacaan Alkitab dengan perspektif poskolonial berupaya membongkar warisan interpretasi Barat yang berakar pada rasionalisme dan teologi kolonial, lalu menggeser pusat penafsiran menuju pengalaman komunitas yang hidup di bawah penindasan struktural.

Semangat pembacaan Alkitab dengan perspektif poskolonial selalu berupaya untuk memusatkan perhatian pada pembongkaran relasi kuasa yang membentuk teks Alkitab dan tradisi penafsirannya serta menempatkan pembacaan sebagai praksis pembebasan. Pendekatan ini bekerja melalui prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan cara memahami teks secara kritis dan kontekstual. Pertama-tama dimulai dengan perubahan cara mengajukan pertanyaan terhadap teks dan sejarah penafsirannya.¹⁶ Penafsir tidak lagi memulai semata-mata dari pencarian makna teologis internal teks, melainkan dari analisis relasi kuasa yang membentuk teks dan penafsirannya. Pertanyaan kunci berubah menjadi siapa yang berbicara dalam teks, siapa yang disingkirkan, dan bagaimana teks serta tafsirnya berfungsi dalam konteks dominasi. Oleh karena itu, kritik tidak hanya diarahkan pada tafsir Barat, tetapi juga pada teks itu sendiri sebagai bagian dari dinamika imperium.¹⁷ Pada saat yang sama, menuntut refleksi yang jujur terhadap posisi penafsir yang menyadari bahwa ia membaca dari lokasi historis tertentu yang memengaruhi cara memahami teks dari konteks pascakolonialnya yang membawa pengalaman penjajahan, marginalisasi, dan resistensi.

¹² R. S. Sugirtharajah, *The Bible and the Third World: Precolonial, Colonial, and Postcolonial Encounters* (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001), 248-250.

¹³ Lazare S. Rukundwa, "Postcolonial Theory as a Hermeneutical Tool for Biblical Reading," *HTS Theologisches Studien / Theological Studies* 64, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.4102/hts.v64i1.26>.

¹⁴ Daniel T.Y. Lam, Axolile N.M. Qina, and Mireia Vidal i Quintero, "Introduction: Decolonizing the Text: Postcolonial Interventions in Biblical Studies," *Horizons in Biblical Theology* 47, no. 1 (2025), <https://doi.org/1163/18712207-12341494>.

¹⁵ R. S. Sugirtharajah, ed., *Voices from the Margin: Interpreting the Bible in the Third World* (New York: Oxford University Press, 2002), 127.

¹⁶ Sugirtharajah, *Exploring Postcolonial Biblical Criticism: History, Method, Practice*, 2-3.

¹⁷ Musa W. Dube, *Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible* (St. Louis: Chalice Press, 2000), 3.

Hal lain yang menjadi prinsip dalam semangat pembacaan Alkitab dengan perspektif poskolonial adalah dengan menerapkan pembacaan kontrapuntal sebagai cara menafsir teks.¹⁸ Alkitab secara bersamaan dibaca dan dipahami dari sudut pandang wacana dominan dan dari perspektif pihak-pihak yang disingkirkan oleh wacana tersebut. Penafsir tidak menerima narasi tunggal sebagai pusat makna yang final, melainkan secara kritis menginterogasi sistem pemikiran, kode tekstual, dan praktik simbolik hegemonik yang membentuk teks, sehingga membuka ruang bagi sejarah, pengalaman, dan suara yang terdistorsi atau ditekan oleh relasi dominasi imperial.¹⁹ Dengan cara ini, teks tidak hanya dipahami sebagai kesaksian iman, tetapi juga sebagai produk dunia kekaisaran yang sarat dengan konflik dan asimetri kuasa. Pada akhirnya, tujuan pembacaan kontrapuntal bukan sekadar memperkaya makna teks, tetapi untuk menantang narasi tunggal yang mapan dan membuka ruang bagi pluralitas suara.

Pembacaan Alkitab dengan semangat Poskolonial juga berupaya untuk menginterogasi praktik-praktik representasi kolonial dan kontemporer terhadap ‘yang lain’ serta relasi kuasa yang berada di balik produksi pengetahuan tersebut. Pada saat yang sama, terjadi pergeseran dari pengabaian pengalaman penjajahan, marginalisasi, dan resistensi menuju pengakuannya sebagai sumber pengetahuan penafsiran yang sah dari pinggiran.²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran tidak bergerak menuju satu makna final yang tunggal, melainkan membuka ruang bagi pluralitas makna, suara, dan tafsir yang bertanggung jawab serta membebaskan. Dalam kerangka hermeneutik poskolonial, pluralitas tersebut secara khusus berakar pada perhatian terhadap subaltern, yakni subjek-subjek yang disenyapkan, dimarjinalkan, atau direpresentasikan secara timpang oleh struktur kuasa kolonial dan pascakolonial. Hermeneutik poskolonial dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan analitis terhadap teks, tetapi sebagai praksis epistemologis yang berupaya memulihkan agensi subaltern melalui pembacaan kritis terhadap relasi kuasa yang bekerja dalam teks Alkitab dan dalam horizon pembaca. Penafsiran menjadi arena di mana suara-suara yang terpinggirkan dinegosiasikan kembali, sekaligus sarana untuk mengkritik dan membongkar struktur dominasi baik teologis, kultural, maupun ideologis yang terus direproduksi dalam praktik penafsiran kontemporer.

Logika Tirani Imperium Romawi dan Dominasi Kekuasaan Herodes

Pada masa sebelum sampai pada awal abad masehi, Kekaisaran Romawi menempati posisi sentral dalam struktur kekuasaan di wilayah Mediterania dan sekitarnya.²¹ Realitas ini memungkinkan penulisan dan konteks teks-teks Perjanjian Baru ada dalam kerangka pemerintahan imperium Romawi. Dominasi Romawi bukan sekadar latar geografis tetapi merupakan faktor historis yang menentukan pembentukan pengalaman sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Palestina dan komunitas Kristen awal, termasuk komunitas Matius.

¹⁸ Sugirtharajah, *Exploring Postcolonial Biblical Criticism: History, Method, Practice*, 22.

¹⁹ Catherine Keller, Michael Nausner, and Mayra Rivera, eds., *Postcolonial Theologies: Devinity and Empire* (Louis, Missouri: Chalice Press, 2004), 21-22.

²⁰ Fernando S. Segovia, *Decolonizing the Biblical Studies: A View From the Margins* (Maryknoll, NY: Orbis, 2000), 123-124.

²¹ Coleman A. Baker, ed., *Israel and Empire: A Postcolonial History of Israel and Early Judaism* (London: T&T Clark International, 2015), 223-224.

Pemerintahan Romawi memengaruhi kehidupan masyarakat melalui tiga mekanisme utama. *Pertama*, penaklukan militer yang bersifat sistematis menegaskan superioritas kekuatan Romawi atas entitas politik lokal. *Kedua*, pemungutan upeti menjadi instrumen yang melembagakan ketergantungan ekonomi. Upeti tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi Roma tetapi juga berfungsi sebagai simbol penghinaan dan penegasan status subjek kolonial. *Ketiga*, Roma menggunakan penunjukan penguasa bawahan (*client king*) untuk mengatur wilayah jajahan.²² Melalui mekanisme tersebut, struktur pemerintahan Romawi tidak hanya mengontrol wilayah secara administratif tetapi juga membentuk konteks kehidupan sosial untuk menegakkan stabilitas yang mengakar pada kepentingan politik dan keamanan Romawi.

Di samping itu, kekaisaran Romawi menunjukkan struktur yang sangat hierarkis, di mana kelompok elit yang hanya mencakup sekitar 3–5 persen populasi menguasai kekayaan, kekuasaan, pendidikan, otoritas, dan kehormatan, serta mempertahankan *status quo* politik dan ekonomi yang sarat ketimpangan, sementara mayoritas non-elit hidup pada tingkat subsistensi hingga pada kondisi yang sangat memprihatinkan.²³ Sementara itu, sebagai kekaisaran agraris, Romawi mendasarkan kekayaan dan kekuasaannya pada kepemilikan tanah. Eksploitasi ini menjadi inti mekanisme dominasi elit atas non-elit, yang diwujudkan melalui upeti, pajak, dan sewa atas produksi, distribusi, dan konsumsi.²⁴ Selain kontrol ekonomi, kekaisaran Romawi mempertahankan hegemoni melalui kekuatan militer. Kekaisaran legiun memastikan kepatuhan dengan paksaan, menegaskan posisi dominan elit, dan memelihara struktur agraris yang memungkinkan akumulasi kekayaan oleh segelintir penguasa. Dengan demikian, dominasi Romawi mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial secara terpadu, membentuk kerangka yang menentukan kehidupan komunitas di wilayah jajahan.

Di sisi lain, kekaisaran Romawi mengelola pemerintahan aristokratis melalui sistem perpajakan yang terorganisasi dan menekan penduduk provinsi. Negara menugaskan gubernur dan elite lokal untuk menjamin pemungutan pajak bagi Roma. Sistem ini menargetkan penduduk non Romawi sebagai sumber utama pemasukan dan menghasilkan penghisapan kekayaan secara sistematis.²⁵ Kelas penguasa menjalankan kontrol politik dengan mengenakan pajak, bea, dan berbagai pungutan atas barang serta tenaga kerja. Ancaman hukuman militer seperti kehilangan tanah, dan penyitaan hasil produksi berfungsi sebagai mekanisme paksaan yang memastikan kepatuhan masyarakat. Pada saat yang sama, perangkat hukum, jabatan administratif, dan pejabat politik berperan menormalkan praktik ekstraksi tersebut, sehingga penindasan ekonomi tampil sebagai kewajiban legal. Sistem pajak ini secara langsung memaksa para petani, yang pada dasarnya memproduksi untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri, untuk menciptakan surplus. Surplus tersebut kemudian diekstraksi oleh elit melalui pajak dan sewa, menjadikan produksi agraris sebagai basis utama akumulasi kekayaan

²² Richard A. Horsley, *Jesus and the Politics of Roman Palestine* (South Carolina: University of South Carolina Press, 2015), 30-33.

²³ Joel B. Green and Lee Martin McDonald, *The World on the New Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts* (Grand Rapids Michigan: Baker Academic, 2013), 565.

²⁴ Warren Carter, *The Roman Empire and the New Testament: An Essential Guide* (Nashville: Abingdon Press, 2006), 3-4.

²⁵ Harry O. Maier, *New Testament Christianity in the Roman World* (New York: Oxford University Press, 2019), 81.

kekaisaran.²⁶ Dalam kerangka ini, pajak tidak bersifat netral, melainkan menjadi instrumen eksploitasi yang mengalihkan hasil kerja non-elit ke tangan segelintir penguasa. Pola ini memperlihatkan logika kekuasaan Romawi yang secara inheren otoriter, eksploitatif, dan represif, di mana dominasi politik, ekonomi, dan militer saling menopang untuk mempertahankan hegemoni imperium.

Disaat yang sama, senat Romawi mengangkat Herodes sebagai raja Yudea dan memberinya legitimasi politik imperium. Herodes memerintah dan menegakkan kekuasaan secara kejam. Ia menjadi wajah awal kekerasan imperium yang dialami langsung oleh masyarakat lokal, serta sebagai penguasa klien, Herodes bertindak sebagai agen kekuasaan Romawi dengan menggunakan ketakutan dan kekerasan untuk melindungi posisinya dan membungkam setiap bentuk perlawanan.²⁷ Hal ini nampak jelas dalam ancaman yang mendorong keluarga Yusuf dan Maria untuk mengungsi dari kekerasan negara yang dijalankan oleh penguasa klien Romawi. Tindakan melarikan diri tersebut memperlihatkan bagaimana kehidupan komunitas terjajah dibentuk oleh rasa takut dan ketidakamanan struktural akibat kekuasaan yang represif. Pola dominasi ini menunjukkan logika kekuasaan Romawi yang bergantung pada kontrol ketat terhadap rakyat, relasi kuasa yang menindas dan kekerasan sebagai sarana utama mempertahankan otoritas.

Realitas Pengungsian sebagai Konsekuensi Relasi-Kuasa Kolonial

Realitas pengungsian dalam konteks politik dan konflik tidak bersifat netral, melainkan merupakan pengalaman yang terartikulasikan melalui relasi kuasa yang bekerja secara koersif dan tidak setara. Dalam kerangka ini, pengungsian tidak hanya hadir sebagai dampak konflik, tetapi sebagai hasil dari relasi kuasa yang semena-mena dan berkelindan dengan semangat kolonialisme, imperialisme, dan rasialisasi.²⁸ Relasi kuasa ini dibentuk dan terbentuk oleh para elit yang beroperasi melalui pembedaan diskursif yang menetapkan realitas dominan dan memaksakannya kepada kelompok lain, sehingga menciptakan kerentanan struktural. Kekuasaan mengatur ruang hidup, mengintervensi politik lokal, dan menentukan siapa yang dianggap sah untuk tinggal dalam suatu wilayah.²⁹ Realitas ini menciptakan relasi yang merugikan, di mana manusia sebagai subjek yang semula mengkonstruksi dan merekonstruksi lingkungannya melalui interaksi sosial justru kehilangan agensinya ketika ruang geraknya dibatasi oleh struktur kekuasaan para elit. Oleh sebab itu, realitas pengungsian harus dapat disimpulkan sebagai pengalaman politik yang merefleksikan kekerasan struktural dan keberlanjutan logika kolonial dalam sejarah manusia yang masih eksis hingga kini.

Narasi-narasi Alkitab juga memberi penjelasan terkait pengalaman pengungsian sebagai konsekuensi langsung dari praktik kekuasaan yang timpang yang ditandai oleh

²⁶ Warren Carter, *Matthew and Empire: Initial Explorations* (London: Bloomsbury T and T Clark, 2001), 13-14.

²⁷ Carter, *The Roman Empire and the New Testament: An Essential Guide*, 5.

²⁸ Jennifer Ma, "Racialization, Colonialism, and Imperialism: A Critical Autoethnography on the Intersection of Forced Displacement and Race in a Settler Colonial Context," *Front Sociol* 8, no. 1171008 (2023), <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1171008>.

²⁹ Adese J and Phung M, "Where Are We From? Decolonizing Indigenous and Refugee Relations," in *Critical Refugee Studies in Canada*, ed. Nguyen V. and Phu T. (Toronto: University of Toronto Press, 2021), 117–42.

dominasi imperial, paksaan militer, dan penataan ruang hidup secara sepihak oleh elite penguasa. Narasi Perjanjian Lama, menunjukkan bahwa pengungsian tidak berdiri sebagai peristiwa netral atau insidental, tetapi sebagai kondisi yang diproduksi oleh keputusan politik dan logika kekuasaan imperium. Kitab Yeremia, misalnya, menampilkan pengungsian Yehuda ke Mesir sebagai hasil ketakutan yang rasional terhadap kekerasan politik Babilonia dan runtuhnya tatanan sosial pasca invasi.³⁰ Sementara itu, narasi Perjanjian Baru juga secara jelas menunjukkan bagaimana narasi penyingkiran Yesus ke Mesir sebagai konsekuensi langsung dari relasi kuasa politik yang represif. Sampai titik ini, pengungsian harus dipahami sebagai konsekuensi historis dan politis dari relasi kuasa kolonial yang bekerja secara koersif, hierarkis, dan eksklusif. Di mana pengungsian tidak muncul sebagai peristiwa kebetulan, melainkan sebagai hasil dari praktik kekuasaan yang mengatur ruang hidup, mendisiplinkan tubuh, dan menentukan keberhakan atas tanah serta kehidupan.

Menyingkir untuk Bertahan: Agensi dan Resistensi Subaltern sebagai Praksis Pembebasan dalam Matius 2:13–23

Saat Yesus lahir di Betlehem (Mat. 2:1–10; Luk. 2:1–7), Ia lahir di wilayah kerajaan yang diperintah oleh Herodes Agung sebagai raja klien kekaisaran Roma. Kekuasaan Herodes dikukuhkan langsung oleh Kaisar Augustus pada 30 SM, sehingga Herodes sepenuhnya bergantung pada kaisar dan senat Romawi. Roma mengizinkan Herodes memerintah secara lokal selama ia menjaga stabilitas, tidak mengatur politik luar negeri sendiri, dan melayani kepentingan kekaisaran.³¹ Ketergantungan ini membentuk kebijakan pro-Roma yang menumbuhkan paranoid terhadap potensi pemberontakan yang dapat mengancam tahtanya, lalu mendorongnya memakai cara ekstrem dan brutal demi menjaga dan mengamankan kekuasaan. Sangat jelas, Herodes menjadi representasi kekuasaan Romawi menciptakan suasana ancaman dan dominasi, paksaan dan kontrol politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat lokal demi menjaga stabilitas pemerintahan.

Di tengah relasi kuasa yang semena-mena demi kepentingan elit, kesaksian para majus tentang kelahiran “Raja Yahudi” langsung mengguncang eksistensi Herodes dan takhtanya. Dalam konteks ini, Yusuf, Maria, dan Yesus kecil tampil sebagai *subaltern* yang terpaksa hidup sebagai “buronan” dari kekuasaan yang mematikan. Narasi penyingkiran ke Mesir menjadi respons langsung terhadap ancaman kekuasaan Herodes, sekaligus sebagai bentuk agensi. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria di sini bukan sekadar peristiwa pasif atau krisis namun menunjukkan peran dan keputusan sebagai *subaltern* yang hidup di bawah tekanan imperium dan relasi kuasa yang menindas. Hartmann menegaskan bahwa narasi-narasi Alkitab tentang orang bergerak, berpindah, atau mengungsi menunjukkan kompleksitas sosial di baliknya,³² hal ini konsisten dengan gagasan bahwa mobilitas dalam konteks kekerasan politik

³⁰ Steed Vernyl Davidson, “The Imperial End: How Empire Overtakes Refugees in Jeremiah,” *Political Theology* 19, no. 6 (2018), <https://doi.org/10.1080/1462317X.2018.1502244>.

³¹ Michael R. Trotter, “Judea as a Roman Province, AD 6–66,” in *New Testament History, Culture, and Society: A Background to the Texts of the New Testament*, ed. Lincoln H. Blumell (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 2019), 141–142.

³² Ida Hartmann, “Migratory Thought: Dialogues Between Biblical Scholarship and Anthropology on Human Mobility,” *Religions* 16, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.3390/rel16050540>.

mengandung dimensi agensi terutama bagi mereka yang berada di posisi *subaltern* dalam sistem kekuasaan, termasuk dalam konteks keluarga Yusuf dan Maria ini.

Perlu diakui bahwa, Yusuf sebagai suami sekaligus ayah di sini, memiliki kepekaan membaca situasi, kesigapan dan kesiapan, menghindari kekerasan, dan mempertahankan kehidupan dalam ruang yang disediakan oleh struktur kekuasaan itu sendiri (bnd 2:13-14). Keputusan Yusuf untuk menyingkir dan tidak menantang Herodes secara terbuka, menunjukkan strategi bertahan yang memprioritaskan keselamatan tubuh dan masa depan komunitas kecilnya. Tindakan Yusuf semacam ini merupakan bentuk agensi yang dapat diterima, mengingat bahwa dalam posisi subaltern kerap tidak memiliki akses aman untuk melakukan perlawanan langsung karena langkah itu dapat berujung pada kehancuran total.³³ Bentuk strategi bertahan hidup dan penghindaran yang dilakukan dapat dipandang sebagai bentuk dimensi politik yang menunjukkan agensi dan resistensi di tengah kekuasaan yang dominan. Yusuf membawa keluarganya keluar dari wilayah Herodes menunjukkan kapasitas bertindak di bawah tekanan struktural. Penulis melihat bahwa agensi *subaltern* di tengah dominasi kekuasaan tidak selalu tampil sebagai perlawanan terbuka, namun melalui tindakan konkret yang memungkinkan mereka tetap hidup dan bergerak di tengah tekanan sambil menghindari dan menyesuaikan diri, menunjukkan kemampuan mengambil keputusan rasional di bawah kekuasaan represif.

Pilihan Mesir sebagai tujuan pengungsian juga menampilkan agensi dan resistensi *subaltern* yang bekerja secara sadar dalam situasi kolonial yang menekan dengan perhitungan hati-hati, rasionalitas yang jelas, serta strategi yang mapan. Mesir menjadi ruang geopolitik alternatif yang memberi jarak dari kekuasaan klien Herodes, bukan hanya sebagai lokasi simbolik untuk menggenapi nubuat yang bersifat teologis.³⁴ Di sisi yang lain, keputusan pergi ke Mesir juga masuk akal secara ekonomi dan ketahanan pangan karena wilayah ini menyediakan kebutuhan hidup yang cukup stabil bagi keluarga kecil ini. Sebagaimana dicatat oleh Dube dengan merujuk pada laporan Strabo, bahwa banjir Sungai Nil meninggalkan endapan aluvial yang membuat tanah Mesir sangat subur dan menjamin hasil pertanian melimpah.³⁵ Jadi, dengan keluar dari wilayah Herodes, Yusuf bersama keluarganya secara efektif menggagalkan proyek kekuasaan yang ingin mengontrol dan memusnahkan ancaman potensial bagi keluarganya sambil mengamankan kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik semacam ini merupakan bentuk resistensi non-konfrontatif yang umum dalam konteks imperium, terutama ketika subjek tidak memiliki akses terhadap kekuatan militer atau politik.³⁶ Dengan demikian, narasi pelarian ke Mesir tidak dapat sekadar direduksi sebagai reaksi defensif semata, namun harus dibaca sebagai tindakan yang menampilkan praksis pembebasan yang berakar pada rasionalitas *subaltern*. Keluarga kecil

³³ Gayatri Chakravorty Spivak, "Can the Subaltern Speak?," in *Marxism and the Interpretation of Culture*, ed. Cary Nelson and Larry Grossber (London: University of Illinois Press, 1988); R. S. Sugirtharajah, ed., *Voices from the Margin: Interpreting the Bible in the Third World* (New York: Oxford University Press, 2002).

³⁴ Warren Carter, Matthew and the Margins: A Sociopolitical and Religious Reading (Bangalore: Theological Publications in India, 2007), 132.

³⁵ Zorodzai Dube, "Jesus: The Immigrant Egyptian Jews in Matthew's Sondergut: A Migration Perspective," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 75, no. 4 (2019), <https://doi.org/10.4102/hts.v75i4.5256>.

³⁶ Erica Chenoweth, "The Future of Nonviolent Resistance," *Journal of Democracy* 31, no. 3 (2020): 69–84, <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0046>.

Yusuf bertindak sebagai agen yang memilih hidup, membaca celah kekuasaan, dan memanfaatkan ruang di luar jangkauan dominasi.

Di sisi yang lain, narasi Matius juga menunjukkan bahwa kekuasaan imperial gagal mencapai kontrol total. Keputusan Yusuf dan keluarganya untuk berpindah menandai kegagalan Herodes dalam menguasai tubuh dan masa depan subjek yang ia ancam. Tindakan ini praksis pembebasan yang bersifat kontekstual, di mana pelarian ke Mesir menjadi tanda yang jelas sebagai praktik agensi dan resistensi yang terwujud melalui mobilitas. Keluarga Yesus bertindak sebagai *subaltern* yang tidak menerima begitu saja logika kekuasaan imperial namun bertindak dengan membaca situasi, memanfaatkan ruang di luar jangkauan kekuasaan, dan mempertahankan kehidupan. Tindakan ini memperlihatkan bahwa pembebasan dalam Injil Matius tidak selalu hadir melalui konfrontasi langsung, tetapi melalui strategi bertahan hidup yang menolak tunduk pada klaim absolut kekuasaan.

Gerak Hidup sebagai Praksis Bertahan

Keadaan pengungsian dalam konteks kontemporer seringkali lahir dari struktur kekuasaan yang bekerja secara sistemik dan berlapis yang sangat berkelindan dengan realitas perang, konflik etnopolitik, eksploitasi ekonomi, dan kebijakan negara yang pada akhirnya menghasilkan migrasi paksa. Data dari laman resmi Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2024, sekitar 123,2 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi akibat penganiayaan, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum.³⁷ Angka ini tidak menutup kemungkinan terus meningkat dalam satu dekade terakhir mengingat konteks sekarang mengalami konflik berkepanjangan dan ketimpangan struktural akibat relasi kuasa yang semena-mena. Dengan demikian, fenomena ini menegaskan bahwa pengungsian bukan pilihan bebas individu, melainkan konsekuensi langsung dari sistem yang gagal melindungi kehidupan.

Pembacaan terhadap narasi penyingkiran Yesus ke Mesir (Matius 2:13-23) membuka ruang paralel yang jelas dengan realitas pengungsian kontemporer. Dalam konteks ini, pengungsian keluarga Yesus tidak dipahami sebagai kegagalan moral atau pilihan personal, melainkan karena kekuasaan politik yang bekerja secara paranoid dan represif. Penulis melihat bahwa pola yang sama juga nampaknya sejalan dengan praktik kekuasaan modern yang memproduksi pengungsi melalui kekerasan negara, konflik bersenjata, dan kebijakan keamanan yang meniadakan ruang aman bagi kelompok rentan. Keadaan pengungsi harus dilihat sebagai korban langsung dari sistem kekuasaan, bukan hanya sekadar sebagai masalah sosial semata. Narasi keluarga Yesus sebagai subjek migran akibat kekuasaan yang sewenang-wenang memberi koreksi teologis bagi gereja dalam melihat dimensi relasi kuasa, pengungsian dan penderitaan manusia.

Pembacaan poskolonial terhadap narasi penyingkiran Yesus ke Mesir secara tegas mengarahkan dan merevisi cara pandang gereja terhadap pengungsian, migrasi, dan relasi

³⁷ "Global Trends: Forced Displacement in 2024," in *United Nations High Commissioner for Refugees* (Copenhagen, Denmark: United Nations High Commissioner for Refugees, 2025), <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2024>.

kuasa yang semena-mena. Hal ini karena selama ini praktik pelayanan pastoral dan diakonia gereja cenderung memposisikan pengungsi dan/atau *subaltern* sebagai objek belas kasihan yang membutuhkan bantuan, bukan sebagai subjek yang memiliki suara dan kapasitas bertindak. Penulis berpendapat bahwa dengan mengabaikan agensi dan resistensi pengungsi/subaltern, gereja gagal membaca Injil secara kritis dan justru mereproduksi logika kolonial yang menempatkan *subaltern* sebagai pasif dan bergantung pada kebaikan pihak dominan. Padahal, narasi keluarga Yesus menunjukkan bahwa subjek yang terancam mampu membaca situasi, mengambil keputusan strategis, dan membangun pola bertahan hidup di tengah tekanan struktural. Oleh karena itu, gereja perlu meninggalkan model karitatif yang hierarkis dan bergerak menuju solidaritas yang setara dengan membuka ruang bagi pengalaman pengungsi sebagai sumber refleksi iman dan praksis pembebasan. Jika Yesus sendiri hadir dalam sejarah sebagai anak pengungsi akibat kekuasaan yang sewenang-wenang, maka keberpihakan gereja kepada pengungsi hari ini bukan pilihan tambahan, melainkan konsekuensi iman yang setia pada Injil dan secara sadar menolak warisan logika kolonial dalam kehidupan bergereja.

KESIMPULAN

Tindakan Yusuf bersama dengan keluarga untuk menyingkir ke Mesir merupakan bentuk perlawanan non-konfrontatif yang efektif dalam menghadapi tirani. Agensi *subaltern* tidak selalu tampil dalam bentuk perlawanan terbuka atau revolusi bersenjata. Dalam konteks dominasi imperial yang represif, agensi justru bekerja melalui mobilitas, penghindaran, dan pemanfaatan celah-celah kekuasaan. Dengan membaca peta politik dan ekonomi, Yusuf dan keluarganya menolak klaim absolut kekuasaan Herodes atas tubuh dan masa depan mereka. Tindakan ini menggagalkan proyek kekuasaan yang mematikan sekaligus mempertahankan keberlangsungan hidup. Narasi penyingkiran ke Mesir menghadirkan pengalaman pengungsian sebagai ruang praksis politis, tempat agensi dan resistensi *subaltern* bekerja secara nyata di bawah tekanan kekuasaan imperial. Kekuasaan Herodes, sebagai perpanjangan tangan imperium Romawi, menciptakan kondisi ketakutan dan kekerasan yang memaksa subjek-subjek marginal untuk menyingkir. Dalam situasi inilah Yusuf, Maria, dan Yesus kecil tampil sebagai *subaltern* yang tidak tunduk secara pasif, melainkan bertindak melalui strategi bertahan hidup yang rasional, terukur, dan kontekstual.

REFERENSI

- Ahmed, Farrah. "Arbitrary Power: Caricature and Concept." *Law and Philosophy* 43, no. 6 (2024): 641–68. <https://doi.org/10.1007/s10982-024-09509-0>.
- Baker, Coleman A., ed. *Israel and Empire: A Postcolonial History of Israel and Early Judaism*. London: T&T Clark International, 2015.
- Boe, Roswita Maria, Siprianus S. Senda, and Mikhael Valens Boy. "Peran Keibuan Maria Dalam Matius 2:13-23 Dan Relevansinya Bagi Kaum Kristiani Masa Kini." *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPak)* 24, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.34150/jpak.v24i2.721>.

- Carter, Warren. *Matthew and the Margins: A Sociopolitical and Religious Reading*. Bangalore: Theological Publications in India, 2007.
- . *The Roman Empire and the New Testament: An Essential Guide*. Nashville: Abingdon Press, 2006.
- Chenoweth, Erica. “The Future of Nonviolent Resistance.” *Journal of Democracy* 31, no. 3 (2020): 69–84. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0046>.
- Davidson, Steed Vernyl. “The Imperial End: How Empire Overtakes Refugees in Jeremiah.” *Political Theology* 19, no. 6 (2018). <https://doi.org/10.1080/1462317X.2018.1502244>.
- Dube, Musa W. *Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible*. St. Louis: Chalice Press, 2000.
- Dube, Zorodzai. “Jesus: The Immigrant Egyptian Jews in Matthew’s Sondergut: A Migration Perspective.” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 75, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.4102/hts.v75i4.5256>.
- “Global Trends: Forced Displacement in 2024.” *United Nations High Commissioner for Refugees*. Copenhagen, Denmark: United Nations High Commissioner for Refugees, 2025. <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2024>.
- Green, Joel B, and Lee Martin McDonald. *The World on the New Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts*. Grand Rapids Michigan: Baker Academic, 2013.
- Hartmann, Ida. “Migratory Thought: Dialogues Between Biblical Scholarship and Anthropology on Human Mobility.” *Religions* 16, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.3390/rel16050540>.
- Horsley, Richard A. *Jesus and the Politics of Roman Palestine*. South Carolina: University of South Carolina Press, 2015.
- J, Adese, and Phung M. “Where Are We From? Decolonizing Indigenous and Refugee Relations.” In *Critical Refugee Studies in Canada*, edited by Nguyen V and Phu T, 117–42. Toronto: University of Toronto Press, 2021.
- Kahl, Werner. “Postcolonial Biblical Hermeneutics and Exegesis.” *Ghana Journal of Religion and Theology* 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.4314/gjrt.v14i1.3>.
- Keller, Catherine, Michael Nausner, and Mayra Rivera, eds. *Postcolonial Theologies: Devinity and Empire*. Louis, Missouri: Chalice Press, 2004.
- Lam, Daniel T.Y., Axolile N.M. Qina, and Mireia Vidal i Quintero. “Introduction: Decolonizing the Text: Postcolonial Interventions in Biblical Studies.” *Horizons in Biblical Theology* 47, no. 1 (2025). <https://doi.org/1163/18712207-12341494>.
- Ma, Jennifer. “Racialization, Colonialism, and Imperialism: A Critical Autoethnography on the Intersection of Forced Displacement and Race in a Settler Colonial Context.” *Front Sociol* 8, no. 1171008 (2023). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1171008>.
- Maier, Harry O. *New Testament Christianity in the Roman World*. New York: Oxford University Press, 2019.
- Muller, Whitney Caroline. “‘Issi My Kindt Nie’: An Ideological Study of Matthew 2:16–18 Socio-Cultural Perspectives of Children as Sanctioning of Violence against Them.” Stellenbosch University, 2023.
- Oguz, Hasan. “Authoritarian Recursions: How Fiction, History, and AI Reinforce Control in Education, Warfare, and Discourse.” *Arxiv Preprint*, 2025. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.09030>.

- Postema, Gerald J. *Law's Rule: The Nature, Value, and Viability of the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Rukundwa, Lazare S. "Postcolonial Theory as a Hermeneutical Tool for Biblical Reading." *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 64, no. 1 (2008). <https://doi.org/10.4102/hts.v64i1.26>.
- Segovia, Fernando S. *Decolonizing the Biblical Studies: A View From the Margins*. Maryknoll, NY: Orbis, 2000.
- Siang, Hauw Suk. "Peran Malaikat Dalam Mimpi Yusuf Berdasarkan Matius 2:13-23: Pendekatan Genre Apokaliptik." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37196/kenosis.v9i1.670>.
- Simeon, James C. "The Use and Abuse of Forced Migration and Displacement As a Weapon of War." *Front. Hum. Dyn* 5, no. 172954 (2023). <https://doi.org/10.3389/fhumd.2023.1172954>.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?" In *Marxism and the Interpretation of Culture*, edited by Cary Nelson and Larry Grossber. London: University of Illinois Press, 1988.
- Stargel, Linda. "Exodus in Matthew's Looking Glass: Jesus's Flight to Egypt (Matt 2:13–18) as a Reflection Story." *Horizons in Biblical Theology* 43, no. 2 (2021): 166–86. <https://doi.org/10.1163/18712207-12341431>.
- Sugirtharajah, R. S. *Exploring Postcolonial Biblical Criticism: History, Method, Practice*. Chichester and Malden: Wiley-Blackwell, 2012.
- . *The Bible and the Third World: Precolonial, Colonial, and Postcolonial Encounters*. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001.
- , ed. *Voices from the Margin: Interpreting the Bible in the Third World*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Trotter, Michael R. "Judea as a Roman Province, AD 6-66." In *New Testament History, Culture, and Society: A Background to the Texts of the New Testament*, edited by Lincoln H. Blumell. Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 2019.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 249–66. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93>.